

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Pengetahuan



BUPATI BADUNG AJAK MASYARAKAT IKUTI PROTOKOL KESEHATAN RAYAKAN IMLEK

GUBERNUR KOSTER MINTA MASYARAKAT PAKAI ENDEK BALI SETIAP SELASA
Hal. 2



400 ORANG NAKES DI DENPASAR DAPAT VAKSINASI MASSAL

Hal. 5



HAL
10

Gubernur Koster Minta Masyarakat Pakai Endek Bali Setiap Selasa

Gubernur Bali Wayan Koster mengimbau masyarakat di Pulau Dewata agar menggunakan pakaian atau busana berbahan kain tenun endek/kain tenun tradisional Bali setiap hari Selasa, sebagai upaya menggeliatkan produk IKM lokal di tengah kondisi pandemi.

"Ini berlaku untuk semua, tidak hanya orang kantoran di pemerintah atau swasta, juga masyarakat umum lainnya. Pada hari Selasa itu, kemanapun melakukan aktivitas harus menggunakan pakaian bahan kain tenun endek Bali," kata Koster saat menyampaikan penjelasan terkait SE Gubernur Bali No 04 Tahun 2021 di Gedung Gajah, Jayasabha Denpasar, Kamis.

Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali, telah ditandatangani pada Kamis (28/1) dan berlaku efektif mulai 23 Februari 2021.

"Pemerintah dan masyarakat Bali harus berpihak dan berkomitmen terhadap sumber daya lokal dengan berperan aktif untuk melestarikan, melindungi, dan

memberdayakan kain tenun endek Bali/kain tenun tradisional Bali," ujarnya.

Selain itu, tenun endek Bali telah dicatatkan sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional dengan Nomor Inventarisasi EBT.12.2020.0000085 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia pada 22 Desember 2020.

"Pakaian/busana berbahan kain tenun endek Bali/kain tenun tradisional Bali yang digunakan harus merupakan produk lokal masyarakat Bali. Penggunaannya tidak dibatasi atau tidak harus seragam dengan motif tertentu," ucapnya.

Penggunaan pada hari Selasa dikecualikan jika bertepatan den-



Gubernur Bali Wayan Koster saat menyampaikan penjelasan terkait SE Gubernur Bali No 04 Tahun 2021 di Gedung Gajah, Jayasabha Denpasar (Antaranews Bali/HO-Pemprov Bali/2021).

gan hari Purnama, Tilem, dan Hari Jadi Pemerintah Daerah.

"Jadi, edaran ini berlaku mulai tanggal 23 Februari ditandai dengan memakai pakaian/busana baru berbahan kain tenun endek Bali/kain tenun tradisional Bali, yang dapat dilaksanakan dengan memakai produk lokal IKM masing-masing kabupaten/kota," ucap mantan anggota DPR tiga periode itu.

Koster menambahkan, penggunaan pakaian/busana berbahan kain tenun endek Bali/kain tenun tradisional Bali, sekaligus merupakan apresiasi terhadap kerja sama Pemerintah Provinsi Bali dengan Rumah Mode Christian Dior di Paris yang menggunakan kain tenun endek Bali sebagai busana, termasuk menggunakan motifnya untuk produk tas dan sepatu pada tahun 2021. (ant)

Wagub Cok Ace Minta Dukungan Menparekraf Bangkitkan Pariwisata



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno (tengah) dan Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (kiri) dalam Rakerda I PHRI Bali periode 2020-2025 (Antaranews Bali/HO-Pemprov Bali/2021)

WAKIL Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardana Sukawati meminta dukungan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno agar dapat menjadi pemantik semangat untuk membangkitkan pariwisata di tengah pandemi.

"Tidak hanya soft loan saja yang kami minta dukungan dari pusat, namun program-program lain un-

tuk membangkitkan ekonomi dan pariwisata juga kami harapkan," kata Wagub Bali dalam Rapat Kerja Daerah I PHRI Bali periode 2020-2025 di Ubud, Gianyar, Kamis.

Wagub yang juga Ketua PHRI Bali itu meminta agar pinjaman lunak sebesar Rp9,9 triliun yang diperjuangkan Menparekraf untuk Bali dapat segera terealisasi.

"Hal ini untuk membantu

industri pariwisata di Bali agar bangkit kembali," ujar Wagub yang biasa disapa Cok Ace itu.

Melalui Rakerda tersebut, sebagai Ketua PHRI Bali, Cok Ace meminta pelaku pariwisata di daerah jangan sampai melepas aset-aset yang dimiliki, meskipun di tengah kondisi sulit yang diakibatkan oleh dampak pandemi.

"Untuk itu dibutuhkan kesabaran dari para pengusaha sehingga aset-aset masih tetap dapat dijaga," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan bahwa pihaknya mendukung penuh kebangkitan pariwisata Bali, mengingat Bali merupakan tulang punggung devisa negara.

Untuk itu pihaknya telah melakukan beberapa kajian terkait program-program yang akan digagas untuk mendorong

pariwisata Bali.

Terkait soft loan, Sandi menyebut pihaknya sudah melobi pimpinan menteri terkait dan segera akan diajukan kepada Presiden untuk disetujui. Selain itu, ia juga tengah menyiapkan terobosan Free Covid-19 Corridor (FCC).

"Jadi rencananya yang boleh masuk ke sini adalah wisatawan yang sudah mendapatkan vaksin di negara asalnya dan di sini dilakukan antigen dan mereka bisa langsung beraktivitas karena mereka sudah free COVID-19," ujar Sandiaga Uno.

Sandiaga menyebut konsep itu telah diterapkan belum lama ini dengan program datangnya 5.000 tenaga kerja asing asal China di Morowali, Sulawesi Tenggara.

Dia menyebut sedang mempelajari pola itu agar bisa diterapkan di sektor pariwisata. Penerapannya diprioritaskan terutama di Bali. (ant)

Pemprov Bali Ajukan Empat Usulan Strategis untuk Pemulihan Ekonomi

PEMERINTAH Provinsi Bali mengajukan empat usulan strategis untuk pemulihan ekonomi setempat dari dampak pandemi COVID-19 kepada pemerintah pusat dalam rapat koordinasi pembahasan dana Pemulihan Ekonomi Nasional.

“Yang pertama, kami mengajukan bantuan modal kerja dalam bentuk pinjaman lunak kepada Pemerintah Pusat sebesar Rp9,9 triliun dengan jangka waktu selama 10 tahun dan grace periode selama 2-3 tahun,” kata Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati dalam keterangan persnya diterima Antara di Denpasar, Jumat.

Rakor pembahasan dana PEN secara virtual pada Kamis (4/2) itu dihadiri Deputy Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kemenko Maritim dan Investasi Odo R M Manuhutu dan Direktur Pengembangan Destinasi Regional II Kemenparekraf Deputy Bidang Pengembangan Destinasi dan

Infrastruktur Wawan Gunawan.

Dalam acara itu, Wagub Bali juga didampingi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho, Dirut PT Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma dan Ketua GIPI Ida Bagus Agung Partha Adnyana.

Usulan kedua, yaitu permintaan dua juta dosis vaksin untuk diberikan kepada pekerja sektor pariwisata. “Hal ini dilakukan untuk memberi rasa aman baik kepada pekerja maupun wisatawan yang akan datang berkunjung,” ujar pria yang juga Ketua PHRI Bali itu.

Ketiga, pelaksanaan pembangunan infrastruktur sebagai penunjang pariwisata selama masa pandemi COVID-19 juga menjadi prioritas yang harus diutamakan. “Selain untuk meningkatkan kualitas destinasi dalam menyambut kembali aktivitas pariwisata, proyek pembangunan yang dilakukan juga dapat menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat Bali,”



Wagub Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati bersama sejumlah pemangku kepentingan terkait saat mengikuti rakor pembahasan dana PEN secara virtual (Antaraneews Bali/HO-Pemprov Bali/2021)

ucapnya.

Yang Keempat, usulan mengenai program reaktivasi wisata domestik melalui perjalanan dinas diharapkan dapat diarahkan lebih banyak untuk diselenggarakan di Bali secara tersebar di berbagai kabupaten.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho

mengatakan penting dilakukan revitalisasi terhadap sejumlah toilet yang ada pada destinasi wisata, salah satunya toilet umum yang ada di wilayah Kuta. “Mengingat daerah ini menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan mancanegara dan juga domestik selain Ubud dan lainnya,” ujar Trisno. (ant)

1-28 Februari, Bulan Bahasa Bali 2021 Pamerkan 89 Karya Seni Prasi



Pengunjung melihat-lihat karya seni prasi yang dipamerkan serangkaian Bulan Bahasa Bali 2021 (Antaraneews Bali/HO-Disbud Bali/2021)

SEBANYAK 89 karya seni prasi atau karya seni rupa di atas daun lontar dipamerkan memeriahkan pelaksanaan Bulan Bahasa Bali yang akan berlangsung pada 1-28 Februari 2021 di Taman Budaya Provinsi Bali, Kota Denpasar.

“Ini merupakan pameran seni prasi terbesar dan terlengkap di Bali,” kata Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali Prof

Dr I Wayan “Kun” Adnyana di Denpasar, Selasa.

Pameran karya seni prasi yang bertajuk “Prasikala Nukilan Taru Mahottama” bertempat di Gedung Pameran Kriya Hall Art Center, Taman Budaya Provinsi Bali itu juga dilengkapi dengan tayangan video pameran virtual yang disebar melalui media sosial.

“Jadi, masyarakat dapat men-

yaksikan pameran ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dan melalui media virtual kanal di kanal YouTube Disbud Prov Bali,” ujar Kun Adnyana yang juga akademisi ISI Denpasar itu.

Sementara itu, kurator pameran I Wayan Sujana Sukdu mengatakan koleksi Taman Budaya dan Pusat Dokumentasi Lontar Disbud Provinsi Bali juga dihadirkan dalam pameran (prasara) tersebut.

Selain menampilkan karya seni prasi yang terus mengalami perkembangan bentuk, tema, dan perlakuan medium, juga menghadirkan dua karya instalasi yang menggunakan daun lontar sebagai elemen utama berjudul “Taru Manah” karya Made Ruta dan “Pula Kerti Anyar” karya Made Suparta.

Sujana menambahkan tiga generasi mewakili zamannya pun tampil bersama pada gelar pameran ini, yakni Gusti Bagus Sudiasta dari Bungkulun Buleleng.

Selain sebagai penekun lontar prasi, ia juga seorang dalang, penembang, pembuat tapel (topeng), dan keterampilan lainnya.

Selanjutnya hadir karya Wayan Mudita Adnyana dari Tenganan, Karangasem. Mudita sebagai perupa lontar prasi, ia juga seorang dalang, penembang, dan pemusik gender yang andal.

Prasara (pameran) kali ini, juga menghadirkan perupa generasi baru yang tergabung dalam “Komunitas Operasi” dengan 14 anggotanya anak-anak muda yang merupakan alumnus Undiksha dan “Komunitas Amarasari” beranggotakan mahasiswa DKV FSRD ISI Denpasar.

“Dengan kegiatan ini dapat dihadirkan raga lontar prasi Bali yang mengalami dinamika dari musim ke musim. Cara pandang, sikap, dan kerja kreatif seniman yang beragam menunjukkan artikulasi sangat kaya yang tetap mengacu pada tradisi dan budaya masa lalu,” ucapnya. (ant)

Pemkot Denpasar Sabet Anugerah Meritokrasi Kategori Baik dari KASN

Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar meraih Anugerah Meritokrasi Kategori Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diserahkan secara virtual oleh Ketua KASN RI Prof Agus Pramusinto kepada Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra.

Keterangan resmi yang diterima dari Humas Pemkot Denpasar, Minggu, menyebutkan acara penyerahan penghargaan dalam bidang penerapan sistem merit ini dibuka Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin di Jakarta pada Kamis (28/1) lalu.

Pemkot Denpasar terus berkomitmen dalam mendukung terciptanya reformasi birokrasi, sehingga upaya untuk menciptakan ASN yang berkualitas dapat dioptimalkan guna mengawal kepentingan masyarakat, utamanya dalam mendukung akselerasi pembangunan dan terciptanya kesejahteraan rakyat.

Keberhasilan Pemkot Denpasar dalam meraih penghargaan ini merupakan sebuah modal awal untuk mendukung terciptanya ASN yang berkualitas dan akuntabel.



Hal ini tentu secara linier akan bermuara pada terciptanya akselerasi pembangunan di Kota Denpasar.

"Tentunya kami berterima kasih atas dukungan semua pihak, utamanya ASN di lingkungan Pemkot Denpasar yang terus berupaya maksimal dalam mendukung terciptanya kesejahteraan rakyat, dan penghargaan ini tentu menjadi cambuk untuk terus berusaha maksimal dalam berinovasi mendukung akselerasi pembangunan," kata Wali Kota Rai D Mantra.

Ketua KASN Prof Agus Pramusinto dalam keterangan persnya menjelaskan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, KASN berperan penting dalam mendorong hadirnya SDM ASN yang sesuai



Pemerintah Kota Denpasar meraih Anugerah Meritokrasi Kategori Baik dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diserahkan secara virtual oleh Ketua KASN RI Prof Agus Pramusinto kepada Wali Kota Denpasar IB Rai Dharmawijaya Mantra, di Jakarta, Kamis (28/1/2021). (Antara News Bali/Nyoman Hendra/2021)

kriteria. KASN mengawasi dan memastikan diterapkannya sistem merit, nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku dalam manajemen ASN, sehingga ASN Indonesia yang berkelas dunia dapat terwujud.

"Penerapan sistem merit dalam manajemen ASN diharapkan dapat memicu perubahan mendasar manajemen ASN ke arah yang lebih baik, karena kualifikasi, kinerja,

dan kompetensi secara adil tanpa diskriminasi," ujarnya pula.

Sebagai upaya mengawasi dan memastikan penerapan sistem merit, KASN menggelar Anugerah Meritokrasi. Sejak tahun 2019 hingga akhir tahun 2020, KASN telah menilai penerapan sistem merit terhadap 184 instansi pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. (ant)

Pemkot Denpasar Semprot Disinfektan di Ruang Publik Tekan COVID-19



Denpasar lakukan penyemprotan disinfektan dan prokes untuk tekan COVID-19 (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2021)

PEMERINTAH Kota Denpasar, Bali, kembali melakukan penyemprotan disinfektan di ruang publik, sosialisasi protokol kesehatan, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) hingga menutup fasilitas publik dalam menekan penularan COVID-19 yang belum mereda.

"Berbagai upaya yang dilakukan

pemerintah adalah untuk kebaikan kita semua, terutama untuk menekan penularan COVID-19. Maka dari itu kami tanpa henti selalu melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan ke seluruh wilayah di Kota Denpasar," kata Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Denpasar, Dewa Gede Anom Sayoga di Denpasar, Minggu.

Ia mengatakan langkah yang dilakukan adalah secara berkelanjutan melakukan penyemprotan disinfektan di ruang publik, termasuk juga sosialisasi penerapan protokol kesehatan, hingga PPKM.

"Saat sosialisasi masyarakat ada membandel seakan-akan bermain kucing-kucingan dengan petugas. Saat petugas melakukan sosialisasi mereka mau mentaati, setelah petugas pergi mereka melanggar kembali. Seperti hari ini banyak masyarakat yang berkerumun di tempat bermain di Taman Kota Lumintang, ketika petugas datang sebelah selatan mereka lari ke arah utara, petugas menuju arah utara mereka lagi ke selatan," katanya.

Sayoga mengaku bisa memahami terkait kejenuhan dan masalah kebutuhan pokok masyarakat harus terpenuhi saat pandemi ini karena banyak yang kehilangan mata pencaharian.

Meskipun demikian masyarakat juga harus sadar akan bahayanya COVID-19 terhadap kesehatan. Langkah yang paling utama melawan pandemi ini adalah mentaati protokol kesehatan. Dengan taat protokol kesehatan maka penularan bisa ditekan dan perekonomian bisa kembali normal.

Sebagai petugas Sayoga mengatakan akan terus melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan 3 M yakni menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Jika ada yang melanggar sesuai aturan pihaknya akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

"Jika masyarakat sudah taat dan disiplin prokes tentu tidak perlu harus ada sanksi, oleh karena itu pihaknya mengajak kepada masyarakat untuk selalu disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan ketat," katanya. (ant)

400 Orang Nakes di Denpasar Dapat Vaksinasi Massal

SEBANYAK 400 tenaga kesehatan (nakes) mendapat vaksinasi COVID-19 secara massal di Kota Denpasar, Bali dalam upaya menekan angka terpapar COVID-19.



nakes maka program vaksin untuk instansi pelayanan publik dan masyarakat umum dapat dipercepat,” katanya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Putu Sri Armini saat di konfirmasi, Sabtu, menjelaskan bahwa Pemkot Denpasar terus berkomitmen dalam mendukung percepatan program vaksinasi yang dicanangkan pemerintah pusat.

Ia mengatakan Provinsi Bali dengan jumlah nakes yang cukup banyak mencapai 13 ribu orang lebih diperlukan langkah taktis.

“Vaksinasi massal ini merupakan upaya percepatan program vaksin COVID-19 untuk nakes, sehingga dengan selesainya program vaksin untuk

Ia mengatakan ada pun dalam pelaksanaan vaksinasi massal hari kedua di Graha Sewaka Dharma Kota Denpasar, pada Jumat (5/2) sebanyak 400 nakes turut mengikuti vaksinasi. Angka ini juga sesuai dengan jumlah dosis vaksin COVID-19 yang disiagakan yakni 400 botol atau dosis.

Lebih lanjut dikatakan Sri Armini, bahwa untuk di GSD pelaksanaan vaksin dibagi ke dalam lima tim, yakni tim RS Dharma Yadnya, Surya Husada Ubung, RS Manuaba, RS Puri Bunda, dan RS Bhakti Rahayu. Dengan total keseluruhan bekerja sama dengan 13 rumah sakit (Persi) di Denpasar, baik



Petugas saat melakukan vaksinasi COVID-19 secara massal kepada Nakes di Denpasar (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2021)

rumah sakit swasta maupun pemerintah.

Sri Armini mengatakan bahwa target vaksinasi nakes yang sebelumnya direncanakan selesai Maret 2021, kini diharapkan bisa selesai pekan ketiga Februari 2021.

“Kami menyisir yang belum divaksin sama sekali. Yang sudah dapat tahap pertama nanti

tinggal melanjutkan vaksin yang kedua,” katanya.

Ia menambahkan vaksinasi massal ini merupakan upaya percepatan program vaksin COVID-19 untuk nakes, sehingga dengan selesainya program vaksin untuk nakes maka program vaksin untuk instansi pelayanan publik dan masyarakat umum dapat dipercepat. **(ant)**

DPRD Denpasar Tinjau Gangguan Produksi Air Bersih



Rombongan Komisi II DPRD dan Wawali Denpasar tinjau IPA Belusung Tirta Sewakadarma yang belakangan terganggu distribusi airnya. ANTARA/I Komang Suparta

ROMBONGAN Komisi II DPRD Kota Denpasar, Bali melakukan peninjauan ke instalasi pengolahan air (IPA) Belusung Perumda Tirta Sewakadarma karena akhir ini terjadi gangguan pasokan air minum ke masyarakat pelanggan akibat bahan baku keruh.

Ketua Komisi II DPRD Denpasar, I Wayan Suadi Putra bersama rombongan di Denpasar,

Rabu, mengatakan belakangan ini memang masyarakat mengeluhkan distribusi air bersih mengalami gangguan sehingga anggota dewan melakukan pemantauan langsung ke IPA Belusung.

“Sejak terjadi hujan deras disertai angin kencang di wilayah Bali, maka sumber bahan baku air bersih di Sungai Ayung mengalami banjir lumpur dari hulu. Sehingga

mesin IPA tak mampu bekerja dengan sempurna. Akibatnya pasokan air ke pelanggan pun terganggu,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Wali Kota Denpasar, IGN Jaya Negara juga bersama Komisi II DPRD Kota Denpasar untuk meninjau kondisi lapangan di IPA Belusung, Desa Peguyangan Kaja.

Wakil Wali Kota Denpasar, Jaya Negara menjelaskan bahwa kondisi cuaca saat ini memang membuat proses produksi mengalami gangguan. Hal ini lantaran terowongan air dan intake yang tertimbun pasir.

“Kita bersama-sama Komisi II DPRD Kota Denpasar sudah menyaksikan langsung kendala di lapangan, sehingga kita sudah rancang kebijakan jangka pendek dan jangka menengah,” ucapnya.

Lebih lanjut dijelaskan Jaya Negara, bahwa untuk jangka pendek sebagai upaya memenuhi kebutuhan pelanggan Perumda Tirta Sewakadarma Kota Denpasar maka distribusi air minum menggunakan mobil tangki.

“Untuk jangka pendek kami sudah instruksikan Direksi Perumda untuk menambah mobil tangki air, yang awalnya hanya empat mobil tangki, kini ditambah menjadi 10 tangki, sehingga kebutuhan pasokan air di masyarakat dapat dimaksimalkan,” ujarnya

Dirut Perumda Tirta Sewaka Dharma Ida Bagus Gede Arsana mengatakan bahwa seluruh petugas operasional sudah berupaya melaksanakan tugas pada siang dan malam hari. Namun hal ini lantaran faktor alam kondisi cuaca dengan hujan lebat serta pasir membuat proses produksi menjadi terganggu.

“Kami mohon permakluman, jika cuaca bersahabat maka segera gangguan operasional pendistribusian air bersih bisa mengalir, serta sebagai upaya pelayanan jangka panjang akan dilaksanakan pembangunan kanal untuk memaksimalkan produksi air minum di IPA Belusung, termasuk pembangunan sumur bor dan reservoir yang terus digenjut,” ucapnya. **(ant)**

Badung Susun RKPD 2022 Fokus ke Sektor Kesehatan dan Ekonomi

Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, memberikan penekanan kepada pihak yang terlibat dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 untuk fokus pada dua sektor bidang yang mengalami dampak terparah akibat pandemi COVID-19, yaitu sektor kesehatan dan sektor ekonomi.

"Badung saat ini mengalami penurunan pada sektor kesehatan dan ekonomi. Untuk mengakselerasi pemulihan, saya menekankan agar tim penyusun RKPD dari tingkat kelurahan, desa, kecamatan dan kabupaten agar merancang program kerja pembangunan untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa di Mangupura, Badung, Selasa.

Ia mengatakan pemulihan ekonomi daerah tersebut dapat dilakukan dengan merevitalisasi sektor unggulan untuk menguatkan ekonomi kerakyatan melalui penguatan sektor UMKM dan pertanian.

Wabup Suiasa juga mengemukakan agar semua pihak dari tingkat desa, lurah, kecamatan dan

kabupaten agar RKPD tahun 2022 disusun dan dirancang sesuai dengan kondisi yang ada saat ini, sehingga tidak menimbulkan distorsi di kemudian hari.

"Mengingat kondisi saat ini mengalami penurunan di beberapa sektor akibat pandemi, untuk itu jangan terlalu muluk-muluk dalam menyusun RKPD. Semua harus proporsional dan realistis. Kondisi yang ada saat ini merupakan tantangan untuk kami semua dalam menyusun program kerja untuk masyarakat," katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Badung, I Made Wira Dharmajaya menjelaskan, pihaknya telah menyelenggarakan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan tahun 2022



Wabup Badung I Ketut Suiasa (kiri). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

secara virtual untuk menjangkau aspirasi terhadap rumusan tema RKPD.

Kegiatan itu diharapkan juga dapat menyerap aspirasi para pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pembangunan serta dapat menghasilkan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja (Renja)

untuk tahun 2022.

Ia menjelaskan, pembangunan daerah Badung tahun 2022 diprioritaskan pada sembilan titik pembangunan diantaranya Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Inovasi, Kesehatan, Perlindungan Sosial dan Pengarusutamaan Gender, Pariwisata, Pertanian dan Kebudayaan. (adv)

Pemkab Badung Komitmen Permudah Izin Produk UMKM



Wabup Badung I Ketut Suiasa (kiri) saat memimpin Rapat Perizinan UMKM untuk percepatan pemulihan ekonomi di Kabupaten Badung, Kamis (4/2/2021). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

PEMERINTAH Kabupaten Badung berkomitmen memberikan kemudahan dalam pengurusan perizinan produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai wujud perhatian dan upaya mendukung tumbuhnya UMKM khususnya pada masa pandemi COVID-19.

"Sebagai bentuk dukungan terhadap keberadaan UMKM,

kami siap membantu kemudahan pengurusan perizinan hingga branding produk UMKM agar dapat semakin berkualitas dan mampu bersaing dengan produk lain di pasaran," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa saat Rapat Perizinan UMKM untuk Percepatan Pemulihan Ekonomi di Badung, Kamis.

Ia mengatakan, saat ini

Pemkab Badung terus memberikan perhatian serius dalam menumbuhkan sektor UMKM di tengah masyarakat, karena UMKM terbukti sanggup bertahan dalam kondisi yang sulit seperti dalam situasi pandemi COVID-19.

Pihaknya terus mendorong masyarakat agar dapat berkolaborasi dalam mendirikan UMKM agar UMKM bisa tumbuh bergeliat sehingga dapat mengurangi dampak pandemi COVID-19, terutama dampak sosial ekonomi.

"Pada saat ini banyak masyarakat kami yang mengalami kesusahan akibat COVID-19. Kalau UMKM hadir, setidaknya bisa mengakomodir dan mengurangi pengangguran terbuka yang ada di Badung. Untuk itulah kami berupaya memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam hal pengurusan izin UMKM," ujarnya.

Wabup Suiasa menambahkan, pihaknya berharap masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam

mendorong geliat UMKM di Badung termasuk dengan memberikan saran dan kritik dalam kebijakan terkait UMKM.

"Kami ingin masyarakat ikut aktif dalam menggeliatkan sektor UMKM, karena kami sudah berkomitmen untuk mendukung pertumbuhan UMKM sebagai upaya bersama untuk bangkit dalam sektor ekonomi di masa pandemi ini," ungkapnya.

Ia juga meminta agar dalam mengembangkan sektor UMKM dapat dilakukan pendekatan dengan upaya 5M yaitu Management atau pengelolaan, Money atau permodalan, Man atau sumber daya manusia, Marketing atau pemasaran dan Material.

"Ini harus kami lakukan sebaik-baiknya agar UMKM ini berjalan dan juga tolong dibantu juga oleh berbagai pihak lainnya agar dapat berjalan dengan baik," kata Wabup Suiasa. (adv)

Badung Luncurkan Program Matanabe dan Sibertani

DINAS Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Bali, bekerja sama dengan Bank BPD Bali dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) setempat meluncurkan program Masyarakat Tanam Cabai (Matanabe) dan Siswa Belajar Bertani (Sibertani) guna mengantisipasi gejala harga cabai akibat turunnya produksi dan lemahnya alur distribusi.

“Inovasi ini kami harapkan dapat mengatasi permasalahan klasik yang dihadapi setiap tahun yaitu gejolak harga cabai yang merugikan petani dan memberatkan masyarakat,” ujar Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung I Wayan Wijana di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan budidaya cabai memiliki resiko tinggi karena sangat rentan terhadap serangan hama khususnya saat musim penghujan dan membutuhkan modal yang besar sebagai biaya produksi serta harus mendapat pemeliharaan

yang serius dengan penanganan pasca panen yang tepat karena cabai tergolong sayuran mudah busuk.

Menurutnya, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut seperti melalui kegiatan pengembangan hortikultura dan pengaturan pola tanam. Namun hal itu belum mampu mengatasi masalah fluktuasi harga cabai karena faktor produksi dan distribusi.

“Melalui inovasi Matanabe, kami harapkan masyarakat dapat memanfaatkan lahan pekarangan minimal untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan menanam cabai, tomat, terong, sayuran dan sebagainya untuk mengatasi permasalahan tersebut,” katanya.

Sedangkan Sibertani, menurut Wayan Wijana, bertujuan untuk menumbuhkan minat para siswa agar tertarik menekuni bidang pertanian



Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung I Wayan Wijana menyerahkan bibit cabai dalam kegiatan Matanabe dan Sibertani, di Badung, Kamis (4/2). Antara-
renews Bali/HO-Humas Badung/fik

sebagai petani milenial.

Dalam program Matanabe dan Sibertani, Desa Adat Dalung dan beberapa sekolah dipilih sebagai uji coba percontohan dikarenakan merupakan daerah transisi perdesaan dan perkotaan yang berkembang pesat sangat ideal untuk pengembangan urban farming.

Nantinya, masing-masing

Kepala Keluarga akan diberikan bantuan bibit cabe dan pupuk sebagai stimulus serta akan didampingi para penyuluh pertanian. Jika kegiatan ini berhasil, program itu akan dirancang setiap tahun di desa lainnya untuk meningkatkan luas tanam produksi cabai dalam mengantisipasi melonjaknya harga cabai. (adv)

Pemkab Badung Undang Perusahaan Jelaskan Penerapan Protokol Kesehatan



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa. Antara/HO-Humas badung/fik

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali mengundang unsur perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut untuk memaparkan penerapan protokol kesehatan pencegahan penyebaran pandemi COVID-19 yang dilakukan dalam kegiatan usahanya.

“Kami telah mengundang PT.

Tirta Investama Aqua Mambal untuk mendengarkan secara langsung bagaimana penerapan protokol kesehatan dalam kegiatan operasionalnya yang tetap memerlukan arahan dari pemerintah,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Rabu.

Ia mengatakan, meskipun perusahaan tersebut merupakan kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan esensial air minum publik, namun pihaknya berharap kegiatan operasional dapat dilakukan dengan pembatasan waktu agar tetap mengikuti aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dan protokol kesehatan yang berlaku.

“Dari 24 jam itu agar diatur durasi jam kerjanya yang biasanya terbagi menjadi tiga shift. Sedikit saja kita lengah dan terselip, nanti ke depannya akan menjadi masalah besar karena PPKM ini sangat sensitif,” katanya.

Pihaknya berencana dalam waktu yang tidak ditentukan akan melakukan pengecekan langsung untuk melihat langsung kegiatan operasional PT. Tirta Investama Aqua Mambal untuk memastikan aturan PPKM dan protokol kesehatan dipatuhi

secara ketat.

“Kami juga arahkan agar tiap-tiap shift jumlah pekerjanya dibatasi sehingga dari sisi penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di sektor yang esensial juga ada batasannya,” ungkap Wabup Suiasa.

Sementara itu, Manajer Operasional PT. Tirta Investama Aqua Mambal, I Nyoman Arsana mengatakan, pihaknya berterimakasih kepada Pemkab Badung atas masukan dan arahan yang diberikan.

“Kami siap untuk melaksanakan apa yang menjadi harapan pemerintah sehingga dalam operasional perusahaan kami walaupun bergerak dalam memenuhi kebutuhan esensial masyarakat dapat tetap mematuhi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat serta menaati protokol kesehatan dalam upaya pencegahan COVID-19,” ujarnya. (adv)

Bupati Badung Ingin Kepala Desa Terpilih Sinergikan Program

BUPATI Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta mengharapkan para kepala desa atau perbekel yang terpilih dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak Badung tahun 2021 dapat mensinergikan program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa.

"Khusus kepada yang terpilih, kami harapkan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Badung untuk mensinergikan program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan desa sehingga proses pelaksanaan pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan dapat berjalan dengan baik," ujar Bupati Giri Prasta dalam keterangan Humas Pemkab Badung yang diterima di Mangu-pura, Senin.

Sebelumnya, pada Minggu (7/2), Badung telah melakukan Pilkades Serentak tahun 2021 di 411 Tempat Pemungutan Suara

(TPS) yang tersebar di 34 desa di wilayah Badung.

Pilkades Badung serentak yang dilakukan saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) tersebut, dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat untuk mengantisipasi penyebaran pandemi COVID-19.

Giri Prasta mengatakan siapa pun kepala desa yang terpilih itu adalah putra-putra terbaik di desa tersebut. Sedangkan bagi yang tidak terpilih, ia berharap agar mereka tetap mendukung yang terpilih untuk bersama-sama membangun dan memajukan desa masing-masing.

Untuk memajukan desa, pihaknya akan menghidupkan semua Badan Usaha Milik Desa yang ada di desa dalam upaya meningkatkan perekonomian dan potensi yang ada di desa. Selain itu, Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) juga akan di-



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kiri). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

hidupkan kembali.

"Kami juga berharap agar semua desa harus menjadi desa digital sehingga mempermudah proses semua layanan yang ada di desa," katanya.

Giri Prasta juga memastikan agar nantinya semua desa dapat melakukan pendataan dengan perkembangan teknologi informasi sehingga semua dapat memiliki data yang jelas dan valid.

"Misalnya kami contohkan di desa pendataannya riil berapa jumlah penduduk laki-laki, perempuan, usia dini, remaja, dan usia tua maupun usia lanjut, berapa ada usaha, berapa ada ternak, potensi wilayahnya bagaimana, berapakah jumlah beras yang dihabiskan per bulan dalam hitungan di desa itu sendiri, daging-daging apa saja yang dikonsumsi dan sayur apa saja," katanya. (adv)

Pemkab Badung Buat Kerja Sama dengan BBPOM Denpasar



Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa (kanan) dan Kepala BBPOM Denpasar Ni G.A.N. Suarningsih. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, siap menjalin kerja sama dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Denpasar melalui nota kesepahaman mengenai pemenuhan dan keamanan legalitas.

Kerja sama tersebut dilakukan dalam upaya menumbuhkemb-

angkan dan memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Badung yang sebelumnya telah diupayakan dengan kebijakan mempermudah dan mempersingkat pelayanan perizinan oleh Pemkab Badung.

"Dari sisi keamanan legalitas ditentukan oleh BBPOM, se-

dangkan oleh kami membantu dalam hal kemudahan dan percepatan perizinan. Kemudian dengan hasilnya nanti dibentuklah tim bersama," ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangu-pura, Selasa.

Pihaknya menyambut baik kerja sama yang akan dijalin BBPOM dengan Pemkab Badung khususnya juga dalam hal pemberdayaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dan terjaminnya kondisi kesehatan masyarakat melalui BBPOM.

Sebagai wujud perhatian dalam upaya mendukung tumbuhnya UMKM, pihaknya siap membantu memberikan berbagai layanan kemudahan bagi masyarakat yang mengurus perizinan hingga branding produk UMKM agar semakin berkualitas dan mampu bersaing dengan produk yang lain di pasaran.

"Kami akan terus memberi

perhatian serius dalam menumbuhkembangkan sektor UMKM di tengah masyarakat karena UMKM terbukti sanggup bertahan dalam kondisi yang susah maupun dalam situasi pandemi COVID-19 seperti saat ini," katanya.

Kepala BBPOM Denpasar Ni G.A.N. Suarningsih mengapresiasi Pemkab Badung yang sudah ikut mendorong UMKM untuk berkembang dan berdaya saing.

Menurut dia, kerja sama dengan Pemkab Badung tersebut dilakukan dalam rangka memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di Badung yang sudah memiliki Mal Pelayanan Publik.

"Ini bisa memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat melalui pelayanan publik, sehingga dapat mudah memberikan informasi yakni mengenai obat, makanan obat tradisional, kosmetik dan juga pangan utamanya terkait layanan informasi untuk pendaftaran registrasi obat dan makanan," ungkapnya. (adv)

Badung Batasi Jam Kegiatan Usaha Hingga Pukul 21.00 Wita

BUPATI Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta mengeluarkan Surat Edaran (SE) yang membatasi jam operasional untuk seluruh kegiatan usaha mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 21.00 Wita.

Sedangkan untuk jam operasional pasar tradisional dan usaha terkait sarana pemenuhan kebutuhan esensial masyarakat serta sarana fasilitas kesehatan, dikecualikan dari ketentuan tersebut dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat.

“Surat Edaran yang mulai berlaku sejak hari ini hingga tersebut berisi 14 poin yang perlu mendapatkan perhatian dalam upaya pengendalian penyebaran COVID-19,” ujar Kepala Bagian Humas Badung, Made Suardita di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan SE tersebut mewajibkan pelaku usaha, pengelola pasar tradisional, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan

fasilitas umum untuk memperketat protokol kesehatan dengan pembatasan pengunjung 50 persen dari jumlah kapasitas maksimum.

Pelaku usaha, pengelola pasar tradisional, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum juga diminta tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker serta memasang stiker bertuliskan ‘No Mask No Service’ atau tanpa masker; tidak dilayani pada tempat usahanya.

“Pelanggaran terhadap aturan kegiatan usaha itu dapat dikenakan sanksi secara tegas sesuai Peraturan Bupati Badung Nomor 52 tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 dalam Tatahan Kehidupan Era Baru,” kata Made Suardita.

SE dengan Nomor: 944/442/Setda tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat



Petugas mensosialisasikan aturan jam operasional kegiatan usaha di kawasan Kuta Utara, Badung, Bali, Minggu (10/1/2021) lalu. ANTARA/Naufal Fikri Yusuf.

Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat Dalam Tatahan Kehidupan Era Baru di Badung itu juga mengatur agar kegiatan belajar mengajar, wisuda, seminar, workshop dan sejenisnya tetap dilaksanakan secara daring.

Ia menambahkan terkait pelaksanaan upacara adat dan

keagamaan, masyarakat diminta agar memperhatikan pembatasan jumlah pelaksana upacara.

Sedangkan pelaksanaan ibadah umat agama juga dibatasi kehadirannya maksimal 50 orang, tanpa adanya kegiatan tambahan seperti resepsi, syukuran dan kegiatan sejenis lainnya. (adv)

Sebelas Ekspresi Budaya Tradisional Komunal Badung dapat Sertifikat KI



Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly (kedua kiri) didampingi Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Freddy Harris (kiri) dan Gubernur Bali Wayan Koster (kanan) menyerahkan Sertifikat Kekayaan Intelektual Ekspresi Budaya Tradisional yang dimiliki Kabupaten Badung, Jumat (5/2). ANTARA/Naufal Fikri Yusuf

SEBANYAK 11 ekspresi budaya tradisional komunal yang ada di wilayah Kabupaten Badung, Bali, menerima Sertifikat dan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual (KI) yang diserahkan Menteri Hukum dan HAM RI Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly.

“Kami memberikan apresiasi

kepada Pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah pusat melalui Kemenkum HAM yang telah memberikan Sertifikat Kekayaan Intelektual khusus kepada kearifan lokal dan tradisi budaya di Badung,” ujar Sekretaris Daerah Badung, I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura,

Sabtu.

Dalam penyerahan sertifikat tersebut, ada 24 penerima Sertifikat dan Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual di Bali yang terdiri dari 19 KI Kepemilikan Komunal berupa Ekspresi Budaya Tradisional dan Pengetahuan Tradisional, satu KI Kepemilikan Personal berupa Hak Paten serta 4 KI Kepemilikan Personal berupa Hak Cipta.

Dari 24 penerima sertifikat itu, sebanyak 11 penerima berasal dari Badung yang seluruhnya merupakan Kepemilikan Komunal berupa Ekspresi Budaya Tradisional.

Ekspresi Budaya Tradisional di Badung yang meraih Sertifikat tersebut adalah Kesenian Tradisional Gambuh dari Mengwi, Kerajinan Gerabah dari Basang Tamiang, Tradisi Siat Tipat Bantal Desa Adat Kapal, Tradisi Kebo Dongol, Bangun Sakti Desa Adat Kapal.

Tradisi Siat Geni Desa Adat Tuban, Tari Baris Babuang Desa Adat Batulantang, Tari Baris

Sumbu Desa Adat Semanik, Tari Leko Desa Adat Sibangede, Tradisi Mebuug-buug Desa Adat Kedonganan dan Tradisi Siat Yeh Desa Adat Jimbaran.

Sekda Adi Arnawa mengatakan, dengan diterimanya Sertifikat Kekayaan Intelektual tersebut, artinya kekayaan tradisional sebagai kearifan lokal di Badung sudah memiliki sertifikasi.

“Ini sebagai aset terutama dalam rangka mempertanggungjawabkan kepada dunia internasional, bahwa produk-produk yang sudah mendapatkan sertifikat ini menjadi jaminan salah satunya dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat kami,” katanya.

Nantinya, Pemkab Badung akan terus mendorong seluruh desa adat, masyarakat termasuk Industri Kecil dan Menengah yang memiliki inovasi-inovasi yang berbasis kearifan lokal untuk mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimiliki untuk bisa mendapatkan Hak Kekayaan Intelektualnya. (adv)

Bupati Badung Ajak Masyarakat Ikuti Protokol Kesehatan Rayakan Imlek

BUPATI Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta mengajak seluruh umat dan masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek 2021 di wilayah tersebut untuk terus mematuhi berbagai protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.

"Kami berharap seluruh masyarakat yang merayakan Tahun Baru Imlek ini agar mematuhi kebijakan yang berlaku sehingga Bali, khususnya Badung dapat segera bangkit dari Pandemi COVID-19," ujar Bupati I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan, pihaknya telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor: 944/442/Setda tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat dalam Tatanan Kehidupan Era Baru di Badung.

Surat Edaran tersebut berisi sejumlah poin salah satunya mengatur pelaksanaan upacara adat dan keagamaan agar memperhatikan pembatasan jumlah pelaksanaan upacara.

Dalam Surat Edaran tersebut, setiap pelaksanaan kegiatan juga wajib melapor dan berkoordinasi dengan

Satuan Tugas penanganan COVID-19 pada se-

mua tingkatan, baik desa, kelurahan, kecamatan dan kabupaten.

"Pelaksanaan ibadah umat agama dibatasi kehadirannya maksimal 50 orang, tanpa adanya kegiatan tambahan seperti resepsi, syukuran dan kegiatan sejenis lainnya," katanya.

Bupati I Nyoman Giri Prasta bersama Wakil Bupati I Ketut Suiasa juga mengucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2572 bagi seluruh masyarakat Badung yang

merayakannya.

"Kepada masyarakat kami keturunan etnis Tionghoa yang merayakan kami ucapkan selamat Tahun Baru Imlek 2572," ungkapnya.

Ia berharap, perayaan Tahun Baru Imlek di tengah pandemi COVID-19 dapat menjadi momentum untuk introspeksi dan evaluasi diri serta menghayati arti penting kebersamaan, persatuan, dan kedamaian.

"Mari jadikan perayaan ini sebagai momentum untuk memperlerat rasa kebersamaan dan kehidupan kebangsaan di daerah ini, sehingga jadi lebih harmonis, penuh ikatan persaudaraan, dan saling berbagi kasih sayang satu sama lain," ujar Bupati Giri Prasta. (adv)



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa. AntaraNews Bali/HO-Humas Badung/fik

Badung Cairkan Bansos Tunai untuk Masyarakat Terkait PPKM



Pelaksanaan pencairan BST PPKM termin satu di Kantor Desa Buduk, Badung, Kamis (11/2/2021). ANTARA/Humas Badung

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, melanjutkan pencairan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk masyarakat terkait penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) termin satu.

Pencairan dilakukan setelah Pemkab Badung melakukan

proses verifikasi, validasi dan cleansing data secara berjenjang terhadap Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Kami berkomitmen untuk membantu masyarakat Badung selama penerapan PPKM. Kami pastikan program ini berlanjut, karena kami sudah mendapat-

kan data masyarakat yang valid berkaitan program ini," ujar Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan, pihaknya menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan penyaluran BST PPKM di Badung. Hal itu terjadi karena berbagai proses yang harus diselesaikan dalam penyaluran BST tersebut.

Dalam proses penyaluran BST, Pemkab Badung harus melakukan cleansing terhadap data masyarakat penerima bantuan, karena banyak ditemukan ada data NIK yang ganda dan juga ada data masyarakat yang sudah pernah mendapatkan bantuan sebelumnya.

Menurutnya, hingga saat ini di seluruh wilayah Badung ada sekitar 50 ribu data KPM yang diajukan, namun berdasarkan hasil cleansing didapatkan 40 ribu data yang sudah tervalidasi.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas ke-

terlambatan ini. Kami tidak ada niat untuk menghambat, tetapi ini semua murni karena proses kerja, mengingat juga tidak mudah bagi BPD Cabang Mangupura dalam menyiapkan blangko atau formulir pembuatan rekening dalam jumlah puluhan ribu," katanya.

Bupati Giri Prasta menambahkan, apabila ada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan, maka disarankan untuk segera melapor ke Dinas Sosial Badung yang sudah menyiapkan kantor pengaduan masyarakat, sehingga bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

"Kami mohon masyarakat untuk bersabar, karena kami pasti melakukan yang terbaik untuk masyarakat kami. Untuk semua wilayah Badung dalam seminggu ini akan kami selesaikan dan di hari libur pun kami tetap bekerja untuk menyelesaikan ini," katanya. (adv)

Gianyar Terapkan PPKM Mikro Pada 70 Desa

KABUPATEN Gianyar menerapkan PPKM berskala mikro untuk periode 9 - 22 Februari 2021 pada 70 desa atau kelurahan di wilayahnya.

“Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri No 3/2021 terkait penanganan virus corona (Covid-19), Kabupaten Gianyar menyiapkan teknis pelaksanaan PPKM berskala mikro,” ujar Sekda Kabupaten Gianyar I Made Gede Wisnu Wijaya, dalam siaran pers Diskominfo Gianyar, Selasa.

PPKM Berskala Mikro berlaku efektif di wilayah Kabupaten Gianyar mulai Selasa, 9 Februari hingga 22 Februari 2021. Untuk itu, Sekda Gianyar mengadakan rapat bersama Dandim 1616/Gianyar dan Kapolres Gianyar beserta OPD terkait untuk menyatukan sikap dalam penerapan PPKM Berskala Mikro di Ruang Sidang Utama Kantor Bupati (8/2).

PPKM Berskala Mikro merupakan penyempurnaan dari

penerapan PPKM sebelumnya. PPKM Jawa-Bali ruang lingkup wilayahnya adalah kabupaten, kini PPKM Berskala Mikro semakin mengerucut hingga ke desa dan kelurahan.

“Penerapan PPKM berskala mikro ini akan melibatkan seluruh unsur yang ada di desa adat dan desa dinas dalam penegakannya. Keterlibatan MDA dan bendesa adat juga diharapkan dapat mengefektifkan penerapan PPKM Berskala Mikro ini,” tambah Sekda Gianyar.

Berdasarkan kesepakatan bersama, seluruh lurah dan perbekel agar bersinergi dengan desa adat untuk mengaktifkan kembali Satgas Gotong Royong Berbasis Desa Adat dan Relawan Covid -19 Desa dengan struktur organisasi, tugas, dan fungsi yang diatur dalam keputusan bersama Gubernur Bali bersama Majelis Agung Desa Adat serta penaktifan pos komando (Posko)



Sekda Gianyar menggelar rapat bersama Dandim 1616/Gianyar dan Kapolres Gianyar beserta OPD terkait untuk menyatukan sikap dalam penerapan PPKM Berskala Mikro (Dok Humas)

gotong royong pencegahan covid-19 berbasis desa adat dan posko relawan lawan covid-19 desa di Kabupaten Gianyar sebagai wadah aktivitas satgas gotong royong.

Hasil evaluasi tim satgas covid 19 Kabupaten Gianyar menetapkan 70 desa/kelurahan yang ada di Kabupaten

Gianyar wajib menerapkan PPKM Berskala Mikro dengan pertimbangan 64 desa/kelurahan berada pada zona oranye/kuning dan merah, sedangkan enam lainnya memiliki pasar tradisional dan objek wisata yang juga disyaratkan menerapkan PPKM Berskala Mikro. (ant)

Bupati Bangli Angkat 39 Pegawai PPPK



Bupati Bangli I Made Gianyar mengangkat 39 pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) (Foto Humas Bangli)

BUPATI Bangli I Made Gianyar mengangkat 39 pegawai PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja), sekaligus menyerahkan SK (surat keputusan) pengangkatan mereka di halaman kantor bupati, Senin.

Kepada pegawai yang men-

erima SK PPPK, Bupati Bangli I Made Gianyar mengucapkan selamat dan mengharapkan semoga pengangkatan PPPK tahap berikutnya nanti, karena daftar stres-nya masih banyak.

“Semoga nanti rekan-rekan lainnya yang belakangan, para

PTT, GTT yang ada di Kabupaten Bangli secara priodik bertahap bisa ditingkatkan statusnya ada yang menjadi PNS asalkan memenuhi syarat apabila umurnya di bawah 35 tahun ada peluang untuk menjadi PNS,” ujar Bupati.

Bagi yang lewat umurnya 36 tahun sampai 57 tahun, satu tahun sebelum pensiun, para pegawai PTT, GTT memiliki harapan untuk menjadi PPPK.

“Kami berharap kepada pegawai PPPK yang sudah diangkat ini agar bekerja dengan baik, berikanlah nilai pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat di dalam melaksanakan tugas dimanapun bekerja harus mampu menjadi suri tauladan bagi pegawai dengan mengutamakan kedisiplinan dan selalu taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tetap mengedepankan pengabdian, dedikasi, loyalitas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan abdi

masyarakat,” kata Bupati Made Gianyar.

Acara pengangkatan itu dihadiri pula Wakil Ketua DPRD Bangli I Nyoman Budiada, Sekda Bangli Ida Bagus Gde Giri Putra, dan Pimpinan OPD (organisasi pemerintahan daerah) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangli.

Sementara itu, Plt. Kepala Badan Kepegawaian daerah dan Pengembangan SDM Kabupaten Bangli Komang Pariartha mengatakan jumlah formasi PPPK sesuai dengan surat menteri negara pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no : B/339/2019 tentang pengadaan tenaga PPPK tahap I tahun 2019 yang memprioritaskan tenaga guru, tenaga kesehatan dan penyuluh pertanian, dari tenaga honorer eks K-II yang ada dalam data base BKN dan memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan dan sistem seleksinya menggunakan CAT UNBK. (ant)

Selasa, Tabanan Mulai Terapkan PPKM Mikro

SESUAI Surat Edaran Mendagri, Pemerintah Kabupaten Tabanan memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan menerapkan PPKM berbasis mikro untuk tingkat Desa, mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai 22 Februari 2021.

Hal itu diungkapkan dalam kegiatan Rapat Koordinasi tindak lanjut terkait PPKM Tahap III di Kabupaten Tabanan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, di ruang rapat lantai III kantor Bupati setempat, Senin.

Sekda I Gede Susila mengatakan PPKM berbasis mikro ini adalah tindak lanjut dari PPKM tahap I dan Tahap II sebelumnya. Mengingat pelaksanaan dua PPKM tersebut belum memberikan hasil yang maksimal terhadap penurunan covid-19, khususnya di Kabupaten Tabanan.

"Hal ini menyebabkan masih diperlukan pengetatan-pengetatan dan penguncian-penguncian terhadap pelaksanaan PPKM

sesuai intruksi Mendagri yang harus memberlakukan PPKM berbasis mikro yang dilakukan pada kegiatan di RT/RT. Kalau kita di tingkat Desa ataupun Desa adat," ujar Susila.

Penerapan PPKM berbasis mikro yakni berbasis Desa untuk di Tabanan akan dilaksanakan sesuai dengan zona-zona penyebaran Covid-19, yakni zona merah, oranye, kuning dan hijau. Di setiap zona akan diterapkan PPKM yang berbeda guna lebih mengoptimalkan penerapan PPKM, sehingga mampu memutus penyebaran pandemi ini.

Susila menambahkan, dalam instruksi ataupun Surat Edaran Mendagri yang diberikan kepada masing-masing peserta rakor, telah dijelaskan bagaimana penanganan-penanganan PPKM di setiap zona juga tentang pembentukan posko-posko di setiap wilayah sudah diatur sedemikian rupa. Tinggal pelaksanaan di masing-masing wilayah.

"Silakan lakukan langkah-



Rapat Koordinasi tindak lanjut terkait PPKM Tahap III atau PPKM Mikro di Kabupaten Tabanan yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tabanan I Gede Susila, di ruang rapat lantai III kantor Bupati setempat, Senin (8/2/2021). Pemkab Tabanan memperpanjang PPKM dengan menerapkan PPKM berbasis mikro untuk tingkat Desa, mulai tanggal 9 Februari 2021 sampai 22 Februari 2021. (FOTO Antara News Bali/Pande Yudha/2021)

langkah penting sesuai dengan apa yang telah ditetapkan. Disiplinkan masyarakat agar tidak kecolongan dan memang sangat perlu waktu bagi kita. Hal ini sudah jelas di Mendagri dan tidak mempengaruhi antar desa dengan desa lainnya. Bukan berarti yang di zona merah tidak bisa dimasuki orang luar desa, namun dibatasi kegiatan

upacara adat, ibadah, dan lainnya," imbuh Susila.

Kapolres Tabanan Mariochristi P.S Siregar mengatakan dalam PPKM berbasis mikro ini sudah tentu pengetatan-pengetatan dilakukan di wilayah desa yang terdiri dari banjar-banjar. Ia menegaskan Kades merupakan ketua posko di tingkat desa. (ant)

Enam Pura di Kabupaten Tabanan Ditetapkan Jadi Cagar Budaya



Enam pura di Kabupaten Tabanan, Bali, yang merupakan kawasan Catur Angga Warisan Budaya Dunia, telah ditetapkan sebagai Enam Cagar Budaya Peringkat Kabupaten oleh Dinas kebudayaan Kabupaten Tabanan bersama BPCB Provinsi Bali melalui penyerahan Surat Keputusan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di ruang rapat Kantor Bupati setempat, Rabu (10/2/2021). (ANTARA/Pande Yudha/2021)

ENAM pura di Kabupaten Tabanan, Bali, yang merupakan kawasan Catur Angga Warisan Budaya Dunia, telah ditetapkan sebagai Enam Cagar Budaya Peringkat Kabupaten oleh Dinas kebudayaan Kabupaten Tabanan bersama BPCB Provinsi Bali.

"Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara," kata Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti dalam penyerahan Surat Keputusan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten di ruang rapat Kantor Bupati setempat, Rabu.

Keenam pura yang telah ditetapkan menjadi Cagar Budaya Tabanan adalah Pura Luhur Batu-kau, Pura Luhur Tamba Waras, Pura Luhur Muncak Sari, Pura Luhur Besi Kalung, Pura Luhur Petali dan Pura Luhur Sekartaji.

"Penetapan cagar budaya itu penting untuk pelestarian dengan pengelolaan yang tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional," kata Bupati dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Tabanan IGN. Supanji.

IGN. Supanji menambahkan Pemkab Tabanan sangat mendukung adanya program pelestarian cagar budaya, karena cagar

budaya adalah warisan yang bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan pengetahuan, pendidikan, agama dan atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Pihaknya juga menjelaskan tim ahli cagar budaya saat ini telah mendaftarkan cagar budaya di 10 kecamatan dan setidaknya saat ini telah meregistrasi sebanyak 365 yang diduga cagar budaya dan yang sudah diverifikasi sebanyak 115 sesuai data sinkronisasi antara Pemkab, Provinsi dan Pusat.

Sementara itu, Ketua Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Tabanan IGN. Tara Wiguna, mengatakan pihaknya menetapkan situs-situs atau benda-benda menjadi cagar budaya adalah mempunyai kriteria-kriteria tertentu dari segi kepurbakalaannya dan kronologinya memang tua. (ant)

Desa Wisata Bakas Dikembangkan jadi "Agriculture Tourism Village"

DESA Wisata Bakas, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Bali, akan dikembangkan menjadi "Agriculture Tourism Village", karena banyaknya masyarakat setempat yang bermata pencaharian sebagai petani.

Keterangan resmi yang diterima dari Humas Pemkab Klungkung, Senin, melaporkan rencana itu terungkap dalam Presentasi Rencana Bisnis dan Master Plan Pengembangan Desa Wisata Bakas yang dihadiri Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta dan Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Anak Agung Putra Wedana.

Dalam Presentasi Rencana Bisnis dan Master Plan di Banjar Kawan, Desa Bakas Banjarangkan (7/2/2021) yang dihadiri Camat Banjarangkan I Dewa Komang Aswin, dan Kepala Desa Bakas I Wayan Murdana, itu, Perwakilan Tim Pengembangan Desa Wisata Bakas, I Putu Merta Astawa, menyampaikan bahwa tim sudah melakukan identifikasi potensi yang dimiliki Desa Bakas.

"Desa Wisata Bakas akan mengusung tema wisata 'agricul-

ture tourism Village' sesuai latar belakang masyarakat Desa Bakas yang mayoritas petani," kata I Putu Merta Astawa.

Ia menyatakan Visi Desa Wisata Bakas adalah Terwujudnya Desa Bakas yang MANTAP (Maju, Aman, Transparan, Adil dan Partisipatif) berdasarkan Tri Hita Karana.

"Misinya ada tiga yakni, Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa berbasis nilai-nilai kearifan lokal Tri Hita Karana, mewujudkan pembangunan pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan melalui pelibatan partisipasi seluruh masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi dengan menggalakkan potensi lokal berbasis pada sistem ekonomi kerakyatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa," katanya.

Dalam sambutannya, Bupati Suwirta mengingatkan Pokdarwis untuk menjaga dan bahkan meningkatkan koordinasi dengan aparat dan masyarakat desa, agar tujuan dari terbentuknya Desa Wisata di Desa Bakas yakni Dari, Oleh dan Untuk masyarakat Desa dapat



Penyerahan Masterplan dari Kepala Desa Bakas Wayan Murdana didampingi Perwakilan Masyarakat I Wayan Widiyana, Ketua Pengelola Pariwisata Desa Bakas I Wayan Arsa dan Ketua Pokdarwis Desa Bakas I Wayan Widiyasa kepada Bupati Klungkung I Nyoman Suwirta didampingi Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Klungkung Anak Agung Putra Wedana dalam acara Presentasi Rencana Bisnis dan Master Plan di Banjar Kawan, Desa Bakas Banjarangkan, Klungkung, Minggu (7/2/2021). (Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Klungkung/2021)

tercapai.

Selain itu, Bupati Suwirta mengharapkan agar masyarakat Desa dapat ikut berperan serta dalam mempromosikan Desa Wisata ini agar Desa Bakas kedepannya dapat menjadi Desa yang mandiri.

Sebelumnya (6/2), Bupati

Klungkung I Nyoman Suwirta kembali mengunjungi Tempat Olah Sampa Setempat (TOSS) Center di Dusun Karangdadi, Desa Kusamba, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, untuk melakukan pemantapan konsep lebih matang dan memotivasi semangat kerja karyawan. (ant)

Sekda Karangasem Tinjau Senderan Tukad Mantri Ujung yang Jebol



Sekda Karangasem Ketut Sedana Merta langsung turun ke lokasi untuk meninjau senderan/tanggul Tukad/sungai Mantri dan Tukad Lebah di Dusun Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan Karangasem, yang jebol akibat hujan deras hingga menghanyutkan perahu nelayan itu, Sabtu (13/2/2021). (FOTO Antara News Bali/HO-Humas Karangasem/2021)

SEKDA Karangasem Ketut Sedana Merta langsung turun ke lokasi untuk meninjau senderan/

tanggul Tukad/sungai Mantri dan Tukad Lebah di Dusun Ujung Pesisir, Desa Tumbu, Kecamatan

Karangasem, yang jebol akibat hujan deras hingga menghanyutkan perahu nelayan itu.

Humas Pemkab Karangasem dalam keterangan tertulis yang diterima, Minggu, melaporkan Sekda Sedana Merta meninjau bencana akibat dampak anomali cuaca yang menimbulkan hujan lebat disertai angin kencang itu, Sabtu (13/2/2021).

Merespons bencana alam yang viral di media sosial dan banyak direspons netizen itu, Sekda Karangasem melihat langsung kondisi dari senderan/tanggul sungai yang jebol sepanjang 20 meter itu.

Sekda Sedana Merta langsung melakukan langkah cepat dengan memanggil Kabid SDA (Sumber Daya Air) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemkab Karangasem, I Made Wiguna, ST,

untuk menangani tanggul yang jebol itu dengan menggunakan kawat bronjong.

Sekda Sedana Merta meminta pihak Balai Wilayah Sungai Bali-Penida untuk mengirimkan bronjong itu agar kerusakannya bisa secepatnya tertangani, sehingga kerusakannya tidak semakin parah.

Atas respons cepat pemerintah daerah ini, masyarakat khususnya kelompok nelayan setempat menyampaikan terima kasih. Mereka berharap proses perbaikan itu cepat selesai, sehingga mereka bisa menambatkan jukung lagi di muara tukad/sungai itu dengan aman.

Warga setempat juga mengapresiasi langkah riil pemerintah daerah yang turun langsung melihat kejadian ini dari dekat. (ant)

Bupati Buleleng Tunda Kenaikan Tarif Pasar Karena COVID-19

BUPATI Buleleng Putu Agus Suradnyana memutuskan meminta Perusahaan Daerah (PD) Pasar untuk melakukan penundaan terhadap kenaikan tarif seluruh pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kabupaten Buleleng, karena masa Pandemi COVID-19 masih berlangsung.

"Ini dilakukan untuk meredakan beban para pedagang serta untuk menjaga perekonomian tetap berputar di masa pandemi," kata Bupati Suradnyana di Singaraja, Kabupaten Buleleng, Senin.

Penundaan kenaikan tarif ini, lanjut Bupati, untuk menjawab keluhan yang disampaikan para pedagang. Ia menilai kenaikan ini menjadi dua sisi yang berlawanan. Di satu sisi PD Pasar ingin memberikan sumbangan PAD, tapi di sisi lainnya masyarakat saat ini masih susah dikarenakan pandemi.

Oleh karena itu, ia setuju dan memerintahkan PD Pasar untuk menunda kenaikan tersebut. "Sampai dengan pandemi ini berakhir. Saya tidak ingin

menambah beban masyarakat khususnya para pedagang. Saya juga ingin kembali menggeliatkan perekonomian di Kabupaten Buleleng," katanya.

Pemerintah Kabupaten Buleleng saat ini masih mencari harga terbawah untuk tarif di Pasar Banyuasri. Keputusan tersebut diambil mengingat saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19. Pemkab Buleleng dan PD Pasar tidak mencari keuntungan dulu di pasar yang baru saja selesai direvitalisasi ini.

Hal terpenting lainnya adalah mengatur para pedagang bermobil. Bagaimana pedagang ini dibatasi operasionalnya, sehingga, pasar tetap bisa berjalan. Jam operasional pedagang bermobil dibatasi dari pukul 16.00 WITA sampai dengan 24.00 WITA. "Kita atur supaya operasional pasar tidak terganggu," katanya.

Untuk penyertaan modal kepada PD Pasar, mantan anggota DPRD Provinsi Bali ini mengatakan tidak harus seperti itu. Saat ini juga masih dihitung berapa



Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana (Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Buleleng/2021)

pengeluaran untuk operasional Pasar Banyuasri. Namun, karena pemerintah wajib hadir dari sisi kebersihan, tidak ada salahnya untuk melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

"Sementara masih seperti

itu. Mereka (PD Pasar) juga masih menghitung dan menganalisa. Saya nantinya lebih memilih harga terbawah untuk kembali menggeliatkan perekonomian masyarakat," katanya. **(ant)**

Selasa, Jembrana Mulai Laksanakan PPKM Mikro



Untuk menekan laju penularan Covid-19, Pemkab Jembrana bersama sejumlah institusi melakukan rapat koordinasi pembentukan pokso di desa/kelurahan, Senin (8/2). (Antaraneews Bali/Humas Jembrana/2021)

PEMERINTAH Kabupaten Jembrana, Bali mulai Selasa (9/2) melaksanakan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro hingga ke tingkat dusun atau banjar.

Pelaksanaan PPKM mikro

tersebut dibahas dalam rapat koordinasi antara Pemkab Jembrana dengan sejumlah institusi seperti TNI, Polri termasuk camat dan kepala desa.

"Sesuai dengan instruksi

menteri dalam negeri, termasuk gubernur Bali. Kami akan melaksanakan PPKM mulai hari Selasa," kata Penjabat Sekda Jembrana I Nengah Ledang, yang memimpin rapat di lantai II Kantor Bupati Jembrana, di Negara, Senin.

Ia mengatakan, posko COVID-19 di desa dan kelurahan akan dibentuk, termasuk pengawasan hingga ke tingkat banjar.

Khusus di Kabupaten Jembrana, menurutnya, desa/kelurahan yang menjadi prioritas penerapan PPKM masih didata, berdasarkan jumlah warga yang terinfeksi COVID-19 di wilayah tersebut.

"Dengan PPKM ini kami berharap bisa menekan pertambahan pasien COVID-19 di Kabupaten Jembrana. Semua pihak harus terlibat, khususnya aparat di desa dinas maupun desa adat," katanya.

Menurutnya, antara desa dinas dan desa adat harus bersin-

ergi dan bahu membahu untuk mencegah penularan COVID-19, termasuk dengan PPKM yang akan dilaksanakan selama 14 hari.

Di sisi lain, Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Jembrana dr I Gusti Agung Putu Arisantha mengatakan, secara kumulatif, warga Jembrana yang terinfeksi COVID-19 mencapai 1682 orang.

Dari jumlah tersebut, menurutnya, 1519 orang dinyatakan sembuh dan 53 orang meninggal dunia.

Terkait vaksinasi tenaga kesehatan, ia mengatakan, sudah mencapai 90 persen lebih, yang segera akan dilakukan vaksinasi tahap kedua.

"Setelah itu vaksinasi akan dilanjutkan untuk TNI, Polri dan ASN yang ditargetkan selesai pada tanggal 20 Februari," katanya.

(ant)

FTK Undiksha Perkenalkan Pendidikan Vokasi Pada 696 Siswa dan Guru

FAKULTAS Teknik dan Kejuruan (FTK) Undiksha, Singaraja, Bali, memperkenalkan pendidikan vokasi/kejuruan kepada 696 siswa dan guru melalui webinar.

"Peserta webinar ada 333 siswa dan 363 guru yang berasal dari Jawa Timur, Bali, NTT, NTB dan sekitarnya," kata Ketua panitia webinar Agus Aan Jiwa Permana, S.Kom., M.Cs, dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat.

Ia menjelaskan webinar pada Rabu (27/1) itu membahas pentingnya pendidikan vokasi, sekaligus memberikan gambaran kepada siswa dalam memantapkan langkah untuk melanjutkan studi dan bergabung bersama di FTK Undiksha.

Narasumber webinar adalah Dr. phil. Dessy Seri Wahyuni, S.Kom., M.Eng. dengan materi Pengenalan Dunia Vokasi serta Dekan FTK Undiksha Dr. I Gede Sudirtha, S. Pd., M. Pd. yang mengenalkan tentang program-program pendidikan di FTK Undiksha Singaraja.

Dekan FTK Undiksha Gede Sudirtha memaparkan FTK terdiri dari dua jurusan, yakni Jurusan Teknik Informatika dan Jurusan Teknologi Industri. Jurusan Teknik Informatika terdiri dari program studi S1 Pendidikan Teknik Informatika, S1 Sistem Informasi, S1 Ilmu Komputer, dan D3 Manajemen Informatika.

Sementara Jurusan Teknologi Industri terdiri dari S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 Pendidikan Teknik Elektro, S1 Pendidikan Teknik Mesin, S1 Pendidikan Vokasional Seni Kuliner dan D3 Teknik Elektronika.

"Dalam penyelenggaraan pendidikan, FTK Undiksha memiliki Sumber Daya Manusia yang unggul, profesional, dan berintegritas yang berkualifikasi S2 dan S3 di berbagai disiplin ilmu," katanya.

Tak hanya itu, pihaknya juga mengundang para praktisi, pakar dan professional di dunia kerja dan industri untuk berpartisipasi dalam mengajar dan meny-



Fakultas Teknik dan Kejuruan (FTK) Undiksha, Singaraja, Bali, memperkenalkan pendidikan vokasi/kejuruan kepada 696 siswa dan guru melalui webinar yang juga dilakukan secara "offline" dengan sebagian peserta di kampus setempat, Rabu (27/1/2021). (FOTO Antara News Bali/Made Adnyana/2021)

empurnakan kurikulum FTK Undiksha.

Saat memberikan sosialisasi, Wakil Dekan Dr. Ketut Agustini, S. Si., M. Si., mengatakan FTK Undiksha juga menjalin kerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi dan pendidikan yang

berkaitan dengan kuliah di FTK.

"Kerja sama itu antara lain dengan UNESA dalam hal join teaching dengan seluruh prodi di FTK, yang melibatkan 30 dosen dengan 27 mata kuliah. Pada semester ini kerja sama itu akan berlanjut," katanya. (ant)

Kodam Udayana Siapkan 540 Nakes TNI jadi Vaksinator di Bali



Kasdam IX/Udayana didampingi Kapolda Bali saat memberikan arahan kepada nakes TNI-Polri yang menjadi vaksinator COVID-19, di Makorem 163/Wira Satya. ANTARA/HO-Pendam Udayana. (Antara/Ayu Khandia Pranisitha/2021)

KODAM IX/Udayana menyiapkan 540 tenaga kesehatan TNI untuk bertugas sebagai vaksinator di Provinsi Bali, selama pelaksanaan PPKM skala mikro pada 9-21 Februari.

"TNI juga telah menyiapkan 540 tenaga kesehatan sebagai

vaksinator untuk mendukung program vaksinasi nasional yang telah dicanangkan oleh Bapak Presiden RI. Begitu juga perangkat pendukung sebagai penyimpanan vaksin yang disiapkan," kata Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Candra Wijaya saat membacakan

sambutan Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Maruli Simanjuntak pada Apel Kesiapan Tenaga Vaksinator dan Tracer COVID-19 di Denpasar, Bali, Rabu.

Ia mengatakan bahwa TNI juga menyiapkan perangkat rantai dingin berupa cool box yang telah didistribusikan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut TNI. Sarana prasarana penunjang juga disiapkan untuk wilayah Provinsi Bali yang menjadi titik berat PPKM skala mikro dan vaksinasi.

Selain itu, TNI juga akan mengerahkan 770 Babinsa, 35 Babinpotmar dan 30 Babinpotdirga di lima kabupaten/kota se-Bali. Lima kabupaten/kota yang melaksanakan PPKM skala mikro, di antaranya Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, dan Klungkung.

Bagi Babinsa, Babinpotmar dan Babinpotdirga serta Babinkamtibmas akan diberi pelatihan menjadi tracer COV-

ID-19 sebelum terjun langsung ke desa-desa.

"Sehingga, selain bertugas sebagai penegak disiplin protokol kesehatan, para petugas tersebut dapat juga membantu pemerintah untuk melaksanakan tracing COVID-19 bagi masyarakat," katanya.

Ia mengatakan TNI juga membantu untuk kesiapan SDM dan fasilitas kesehatan tersebut, sesuai dengan instruksi Presiden RI dalam implementasi kebijakan PPKM skala mikro di Provinsi Bali.

Dalam sambutannya yang dibacakan oleh Kasdam IX/Udayana Brigjen TNI Candra Wijaya, Pangdam berharap Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga, Vaksinator TNI, tenaga kesehatan, Prajurit TNI, BPBD, Satpol PP, dan Pecalang sebagai ujung tombak bagi masyarakat agar dapat menjadi agen pencegahan, pendeteksian dan penanggulangan terhadap COVID-19 di desa. (ant)

BI Bali Targetkan 300 ribu "Merchant" QRIS di 2021

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menargetkan jumlah penyedia (merchant) yang memanfaatkan transaksi pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) mencapai sekitar 300 ribu unit pada 2021.

"Untuk mengakselerasi peningkatan merchant QRIS di Bali, kami akan bersinergi dengan PJSP (penyelenggara jasa sistem pembayaran), baik perbankan maupun nonbank," kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Bali, Senin.

Selain itu, pihaknya juga akan bersinergi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang ada di Bali untuk menggunakan QRIS.

Trisno mengemukakan di Bali untuk pembayaran Samsat juga sudah memakai QRIS, demikian pula sejumlah rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Bali sudah menggunakan QRIS.

"Dalam Pameran IKM Bali Bangkit yang digelar Pemprov Bali bersama dengan Dekranasda Provinsi Bali, semua UMKM juga

wajib memakai QRIS," ucapnya.

Tak hanya itu, dengan Korem 163/Wirasatya pun KPwBI Provinsi Bali sudah melakukan sosialisasi dan QRIS telah dipasang di lingkungan TNI se-Bali.

"Untuk memfasilitasi penggunaan QRIS, kami akan bekerja sama dengan BPN dan lembaga-lembaga vertikal yang ada di Bali. Koperasi-koperasi pun akan kami dorong untuk memakai QRIS," ujar mantan Kepala KPwBI DKI Jakarta itu.

Yang tidak kalah penting, termasuk penggunaan QRIS di sektor pariwisata seperti hotel, restoran dan daerah tujuan wisata (DTW) karena transaksi pembayaran non tunai atau nirsentuh inilah yang aman di tengah kondisi pandemi COVID-19.

Trisno menambahkan jumlah



Pengunjung melakukan transaksi pembayaran berbasis digital dengan menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Pantai Pandawa, Badung, Bali, Sabtu (11/7/2020). ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/hp

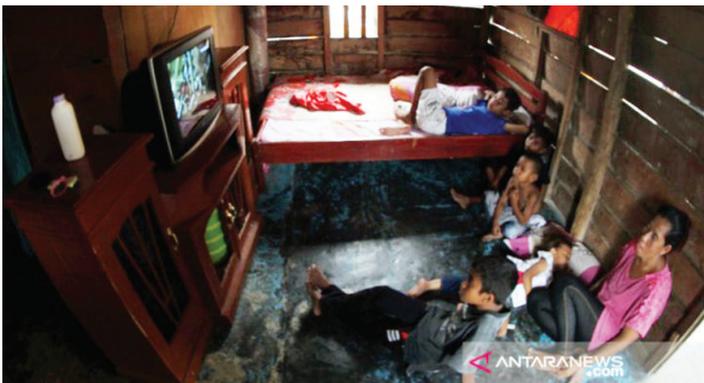
merchant QRIS di Provinsi Bali hingga 29 Januari 2021 sudah sebanyak 183.068 unit. Dari jumlah tersebut, sebanyak 52 persen merupakan usaha skala mikro, 23 persen usaha kecil, 17 persen usaha menengah, 8 persen usaha besar dan satu persen sektor lainnya.

Dari sembilan kabupaten/kota di Bali, jumlah merchant QRIS terbesar ada di tiga kabupaten/kota

yakni Kota Denpasar sebanyak 89.838 unit (49 persen), kemudian Kabupaten Badung dengan 50.526 unit, dan Kabupaten Gianyar 14.565 unit (8 persen).

Pihaknya mencatat hingga Desember 2020, volume transaksi penggunaan QRIS di Bali sebanyak 269 ribu transaksi dengan nilai secara keseluruhan mencapai Rp22,72 miliar. (ant)

PLN Siap Salurkan Stimulus Listrik Periode Februari 2021



Ilustrasi - Warga merasakan betapa pentingnya ketersediaan listrik agar dapat menikmati tayangan televisi (AntaraneWS Bali/HO-PLN/2021)

PLN memastikan pihaknya siap melakukan penyaluran stimulus listrik untuk periode Februari 2021 kepada 32 juta pelanggan rumah tangga daya 450 Volt Ampere (VA) dan 900 VA bersubsidi serta 459.000 pelanggan bisnis dan industri daya 450 VA.

"Untuk bulan Februari juga kami sudah siap untuk menyalurkannya. Kami menyadari stimulus listrik ini sangat membantu meringankan beban kelompok

masyarakat tidak mampu dan rentan dalam menghadapi pandemi Covid-19," kata Executive Vice President Corporate Communication and CSR PLN Agung Murdifi dalam keterangan pers yang diterima ANTARA di Denpasar, Jumat.

Bagi masyarakat yang ingin memperoleh token listrik stimulus Covid-19, cara paling mudah adalah melalui Aplikasi PLN Mobile yang terdapat di Playstore atau

Appstore. Setelah selesai mengunduh, pelanggan dapat masuk ke aplikasi PLN Mobile dengan cara:

1. Buka aplikasi PLN Mobile.
2. Klik "PLN Peduli Covid-19" pada bagian Info & Promo.
3. Masukkan ID Pelanggan/ Nomor Meter.
4. Token gratis akan muncul.
5. Pelanggan tinggal memasukkan Token Gratis tersebut ke meteran yang sesuai dengan ID Pelanggan.

PLN juga tetap menyediakan akses melalui website <https://stimulus.pln.co.id/> atau melalui layanan WhatsApp melalui nomor 08122-123-123. Hal ini dilakukan untuk memberikan banyak pilihan akses agar pelanggan mudah mendapatkan stimulus listrik ini.

"PLN menambah saluran melalui Aplikasi PLN Mobile untuk lebih mempermudah, karena tinggal buka aplikasi di HP, masukan ID Pelanggan/Nomor Meter, sudah dapat nomor tokennya," ujar

Agung.

Berdasarkan keputusan pemerintah, perpanjangan pelaksanaan diskon tarif tenaga listrik PLN dibagi dalam ketentuan berikut:

Diskon listrik 100 persen diberikan kepada pelanggan pas-cabayar golongan rumah tangga daya 450 VA, bisnis kecil daya 450 VA, dan industri kecil daya 450 VA. Adapun untuk pelanggan prabayar, setiap bulannya diberikan token diskon 100 persen yang besarnya sama seperti sebelumnya.

Diskon 50 persen diberikan kepada golongan pelanggan rumah tangga 900 VA bersubsidi pas-cabayar. Kemudian bagi pelanggan prabayar diskon 50 persen langsung diterima saat membeli token (harga belum termasuk PPF).

Stimulus yang diberikan pada periode Januari - Maret 2021 maksimal setara dengan 720 jam nyala. Pemakaian di atas itu akan dikenakan tarif normal subsidi. (ant)